



Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Lembang Pemanukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja

Dian Intan Tangkeallo ^{a,*}, Dwibin Kannapadang ^b

Universitas Kristen Indonesia Toraja

*Corresponding author email address: dian.tangkeallo@gmail.com @gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
Effectiveness,
Property Tax.

This study aims to determine the effectiveness of land and building tax revenue (PBB) in Lembang Pemanukan, Gandangbatu Sillanan District, Tana Toraja Regency. The type of research used is descriptive quantitative where the researcher provides an overview of how the level of effectiveness of land and building tax revenue (PBB) in Lembang Pemanukan. The data analysis technique used in this research is effectiveness, namely comparing the realization of PBB revenue with the target of PBB revenue. The results showed that the collection of land and building taxes in Lembang Pemanukan, Gandangbatu Sillanan district, Tana Toraja Regency from 2018-2020 was in the effective or successful category. The effectiveness of land and building tax receipts in Lembang Pemanukan, Gandangbatu Sillanan sub-district in 2018-2020 was caused by several things, including public awareness in paying PBB, socialization of taxes to the public directly, so that the PBB reached the target which was said to be effective because it almost reached the PBB target.

Kata Kunci:
Efektivitas,
Pajak Bumi dan
Bangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di lembang Pemanukan kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dimana peneliti memberikan gambaran bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di lembang pemanukan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas, yakni membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan di Lembang Pemanukan kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja dari 2018-2020 dalam kategori efektif atau berhasil. Efektifnya penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Lembang Pemanukan kecamatan Gandangbatu Sillanan pada Tahun 2018-2020 disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, sosialisasi tentang pajak ke masyarakat secara langsung, sehingga PBB mencapai target di katakan efektif karena hampir mencapai target PBB.

Pendahuluan

Dalam rangka melakukan pemungutan PBB yang perlu diperhatikan yaitu sistim pelaksanaan serta tatacara pungutan, petugas pemungut, sarana dan prasarana serta adanya pengawasan, Kegiatan pemerintah Indonesia adalah pembangunan nasional yaitu salah satu kegiatan pemerintah yang berjalan secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan adanya dana yang berasal dari penerimaan Negara. Dari sumber penerimaan Negara pada umumnya terbagi dari dua sumber utama yaitu penerimaan yang bersumber dalam negeri dan pinjaman yang bersumber dari luar negeri. Semakin besar penerimaan dalam negeri, maka dapat dikatakan bahwa Negara tersebut semakin mandiri. Dalam mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembangunan perlu adanya sumber pendapatan yang salasatunya bersumber dari pajak.

Sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dari proses pemerintah, maka selayaknya setiap rakyat dapat mengerti dan memahami peranan pajak dalam menunjang pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional perlu adanya peran aktif masyarakat agar lebih meningkatkan tugas serta bertanggung jawab pada daerahnya, terlebih khusus pada otonomi daerah. Terlaksananya pembangunan daerah melalui pembangunan sektoral dengan rencana peningkatan pembangunan daerah otonomi mempunyai tujuan yang efektif dan efisien untuk menciptakan suatu daerah yang mandiri, maju dan merata diseluru pelosok negri. Daerah otonomi yang berkesinambungan, nyata dan bertanggung jawab diperlukan otoritas dan kemampuan untuk mendapatkan sumber daya keuangan yang bersifat mandiri dengan dukungan keseimbangan neraca keuangan antara pusat dan wilayah tersebut. Terciptanya daerah otonomi yang berkesinambungan, maka dibutuhkan kegiatan yang dapat mmastikan jamininnan kapasitas keuangan itu sendiri yaitu melalui cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan cara peningkatan sumber pendapatan PAD yang ada ataupun dengan menggali potensi penerimaan PAD yang baru sesuai dengan ketetapan serta memperhatikan sumber perekonomian masyarakat. Sumber penerimaan asli daerah yaitu berasal dari hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daeraah.

Pemerintah daerah sudah menetapkan target setiap tahunnya kepada pemerintahan lembang untuk memungut PBB sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi kadang realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Sehingga memerlukan strategi khusus tentang PBB, untuk mengeksplorasi potensi pendapatan PAD dari pungutan PBB di suatu daerah

Hal yang mendasari untuk melakukan penelitian ini karna disuatu instansi pemerintah yaitu Inspektorat kabupaten Tana Toraja adalah tidak lain memeriksa keuangan dan aset daerah, sala satu objek pemeriksaan keuangan Inspektorat

adalah di instansi pemerintah yang ada di lembang yang terdiri dari pemeriksaan keuangan dana desa, Dalam pemeriksaan administrasi keuangan lembang Inspektorat memeriksa seluruh aliran dana desa termasuk potongan atau pajak yang masuk ke kas Negara. Potongan atau pajak tersebut berasal dari pengeluaran dana desa yang dikenakan potongan pajak sesuai jenis pajaknya seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), makan minum rapat, honorarium narasumber, serta pembelian barang dari toko.

Salah satu jenis pajak yang tidak tersentuh oleh pemeriksaan Inspektorat adalah PBB karena itu bukan termasuk dalam dana desa atau dana transfer pemerintah melainkan pungutan wajib pajak dari masyarakat di suatu daerah pedesaan atau kota yang dilakukan oleh petugas kolektor lembang yang telah ditarget oleh BAPENDA kepada setiap pemerintah lembang atau kelurahan. Menurut informasi dari pemerintah terkait dalam hal penerimaan PBB disuatu desa atau kota selalu berubah tingkat realisasinya dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh tingkat laju pembangunan.

Demikian pula dengan lembang Pemanukan kecamatan Gandangbatu Sillanan kabupaten Tana Toraja dalam menghadapi otonomi daerah harus bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dari penelitian ini akan dibahas secara detail tentang PBB pada lembang Pemanukan yang bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pendapatan daerah.

Penelitian ini dilakukan di lembang Pemanukan sebab tingkat realisasi masih rendah maka dari itu pungutan harus dilakukan dengan baik serta adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk membayar pajak demi terwujudnya suatu tingkat realisasi penerimaan PBB yang kita diharapkan.

Kajian Pustaka

Konsep Pajak

1. Pajak

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1)

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.28 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2007 disebutkan bahwa "pajak merupakan Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2018:389) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak yang dikenakan pada bumi dan / atau bangunan dimanfaatkan yang dikuasai dan /atau yang dimiliki oleh orang badan atau

pribadi, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan, perkebunan dan pertambangan

Sifat yang dimiliki PBB yaitu kebendaan yang menetapkan subjek berada didalamnya dan tidak akan dihitung sebagai pajak. PBB tentu akan menghitung berapa besar berdasarkan luas bangunan tersebut bukan orang ataupun benda penunjang lainnya.

Untuk mengetahui efektifitas jenis pajak ini, ada dua objek yang bisa dijadikan reverensi, yaitu:

a. Bumi

Permukaan bumi yang mencakup tanah, darat dan lautan serta benda dalam bumi yang berada di dalamnya. Seperti contohnya nyata adalah persawahan, perkebunan, ladang, tambang hingga pekarangan.

b. Bangunan

Konstruksi bangunan dibuat dan didirikan diatas permukaan bumi, misalnya bangunan tempat usaha, rumah tinggal, hotel, pusat perkantoran, dll.

Semua benda di tanah dan bangunan tidak akan dihitung sebagai pajak, karena beberapa aturan memungkinkan untuk tidak membayar pajak properti dan bangunan sebagai:

- a. Dibangun untuk keperluan bersama, misalnya tempat beribadah, sekolah, rumah sakit pemerintah, panti asuhan, dan tempat wisata public.
- b. Sengaja dibangun untuk tempat peristirahatan akhir benda maupun manusia, seperti makam dan museum barang antik.
- c. Dibuat dengan tujuan sebagai suaka hewan, hutan alam untuk menghindari kepunahan dll.
- d. Digunakan oleh perwakilan dari organisasi organisasi internasional yang disetujui sebelumnya.

Efektivitas

Menurut Mahmudi (2015: 86), jelaskan bahwa “efektivitas terkait dengan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual yang diperoleh”. Memahami efektivitas menurut John adalah “produksi yang akan diukur dengan membandingkan anggaran atau OA (diasumsikan) untuk realisasi atau sistem operasi yang sebenarnya). Jika $OA > OS$ akan disebutkan secara efektif”.

Menurut Mardiasmo (2014:32) pengertian efektivitas “pada hakikatnya terkait dengan tujuan yang dicapai atau target kebijakan. Evektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan oprasional dikatakan efektif apabila suatu kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Maka didalam proses penganggaran akan diarahkan untuk mengorintasikan pada keluaran (output) dan dampak (outcome) melalui langkah langkah efektivitas”. Mardiasmo (2014: 134) “Selain itu juga efektivitas juga terkait dengan kemampuan untuk mencapai tujuan atau tujuan tertentu. Ukuran kapasitas yang dimaksud dapat bervariasi tergantung pada tujuan atau tujuan yang diinginkan untuk dicapai atau didefinisikan”. Dari kesan

di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah ukuran yang berhasil atau tidak adanya organisasi untuk mencapai tujuannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan laporan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada lembang Pemanukan kecamatan Gandangbatu Sillanan kabupaten Tana Toraja tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus efektivitas yakni membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target PBB.

Rumus efektivitas pajak ubmi dan bangunan adalah:

$$Efektivitas\ PBB = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB\ P2}{Target\ PBB\ P2} \times 100\%$$

Sumber : *Mardiasmo (2017: 134)*

Tabel 1
Tingkat Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 99%	Efektif
80% - 89%	Cukup Efektif
60% - 79%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Hasil dan Pembahasan (Arial, 12, Bold)

Hasil

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. dalam penelitian ini, pemungutan diidentikkan dengan manajemen. Sehingga fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/ penggerakan, dan pengawasan yang digunakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan. Sebelum melakukan pengelolaan data yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka

berikut akan ditampilkan data berupa DHKP Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 2
Target Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan
Lembang Pemanukan Tahun 2018-2020

No	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB
1	2018	Rp 18.547.679	Rp. 18.547.589
2	2019	Rp 21.314.705	Rp. 21.555.430
3	2020	Rp 24.628.843	Rp. 23.889.643

Sumber : data diolah (2021)

Di bawah ini merupakan tabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di lembang Pemanukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020.

Tabel 3
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di lembang Pemanukan
Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2018-2020

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Efektivitas	Kriteria
2018	Rp18.547.679	Rp.18.547.589	99,99%	Efektif
2019	Rp21.314.705	Rp.21.555.430	101,12%	Sangat Efektif
2020	Rp24.628.843	Rp. 23.889.643	96,99%	Efektif
Jumlah			298,10%	
Rata-rata			99,37%	

Sumber : data diolah (2021)

Pembahasan

Rata-rata efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Lembang Pemanukan 2018–2020 sebesar 99,37% .Rata–rata efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Lembang Pemanukan termasuk dalam kategori Efektif, karna rata- rata nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Lembang Pemanukan hampir mencapai 100% yakni sebesar 99,37%

Berdasarkan persentase efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Lembang Pemanukan kecamatan Gandangbatu Sillanan pada tahun 2018 dikatakan efektif dengan tingkat efektivitas hampir mencapai 100%, kemudian pada tahun 2019 tingkat presentase penerimaan pajak bumi dan bangunan

Lembang Pemanukan kecamatan Gandangbatu Sillanan sangat efektif hal ini disebabkan oleh target penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan Pada tahun 2019 persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan Lembang Pemanukan kecamatan Gandangbatu Sillanan di katakana efektif disebabkan oleh target penerimaan pajak bumi dan bangunan hampir mencapai target. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu narasumber, yaitu Bapak Andarias Selaku Kolektor PBB Lembang Pemanukan.

Dari tabel tersebut dapat di ketahui bahwa kesadaran masyarakat Lembang Pemanukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sudah sangat tinggi karena dari sppt yang di tetapkan bisa tercapai hingga 99.99% pada tahun 2018 .101,12% pada tahun 2019 dan 94,99% pada tahun 2020 dengan rata-rata selama 3 tahun yaitu 99,37% dengan kriteria efektif (input) ,indicator sumer daya manusia dari segi kualitas sudah bagus begitupun kualitas sumber daya di kantor lembang Pemanukan sehingga kinerja aparat efektif dan pelayanannya ke masyarakat yang maksimal dan adanya sarana dan prasarana yang memadai dari segi proses berjalan dengan baik sebagai mestinya baik dalam hal penagihan aktif maupun teguran berjalan dengan efektif kepada masyarakat lembang pemanukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku begitupun dengan target yang sesuai dengan kondisi riil, karena adanya penentuan target penerimaan pajak bumi dan bangunan, dari pendekatan sasaran atau (output) yang terlihat efektif dapat di katakana sudah mencapai target penerimaan dengan jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target yang di tetapkan

Efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di lembang pemanukan yang sudah efektif dengan kesadaran wajib pajak tentang arti pentingnya pajak bumi dan bangunan dalam menunjang pembangunan.dalam membayar pajak bumi bangunan terlihat bukti nyata dari pajak yang di bayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Giatnya aparat dalam melakukan penagihan serta adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan tata perpajakan terhadap waji pajak yang aktif di lakukan oleh aparat lembang pemanukan

Dalam penelitian Damaiyanti dan Setiawan (2014) tentang analisis efektifitas dan kontribusi PBB terhadap PAD Kota Denpasar tahun 2009-2013, penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan PBB tahun 2009-2013, sangat efektif dengan rata-rata di atas 100% yaitu 121,42%

Dari persentase efektifitas terseut lebih tinggi sebesar 22,05% jika di bandingkan dengan efektifitas penerimaan PBB di Lembang pemanukan dengan persentase 99,37% ini dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti, letak Lembang Pemanukan yang berada di pedesaan yang jangkauan teknologinya masih berada di bawah jika bandingkan dengan daerah kota Denpasar yang teliti dengan Damaiyanti dengan Setiawan.

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemungutan pajak bumi dan bangunan di Lembang Pemanukan

kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja dari 2018-2020 dalam kategori efektif atau berhasil. Efektifnya penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Lembang Pemanukan kecamatan Gandangbatu Sillanan pada Tahun 2018-2020 disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, sosialisasi tentang pajak ke masyarakat secara langsung, sehingga PBB mencapai target di katakan efektif karena hampir mencapai target PBB.

Daftar Pustaka

- Anonim, 1994, *Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Anonim, 2009, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribudi D aerah*.
- Depdagri kepmendagri No. 690.900.327(Adelina 2012)*
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi kedua Yogyakarta UPP STIM YKPM
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan. Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo, (2018) *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Safri. 2010. Pengantar Ilmu Perpajakan. Jakarta: Graint
- Siti Kurnia Rahayu (2017:91): Administrasi Perpajakan (Tax Administration)
- Suandy,Erly. 2013. Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Sudirman, Rismawati dan Amiruddin Antong. 2016. *Perpajakan, Pendekatan, Teori dan praktek. Empat dua Media*, Makassar
- Suhardito, dan Bambang Sudiby. 1999. Pengaruh faktor-faktor yang melekat pada diri wajib pajak terhadap keberhasilan penerima PBB
- Simposium Nasional Akuntansi II, Malang 67 Triada, Tryana A.M. 2013. Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WP Di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal/ISSN 2303-1174
- Tjahjono. (2006). Pengaruh tingkat kepuasan atas pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Bagian Timur I. Jurnal Universitas Airlangga.
- Usman. 2012. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika